

Analisa Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum 2019 di Distrik Muara Tami Perbatasan RI-PNG

Melpayanty Sinaga

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih

Email: melpayanty@gmail.com

Yakobus Murafer

Program Studi Politik Pemerintahan Universitas Cenderawasih

Email: yakobusmurafer@gmail.com

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam politik menjadi indikator stabilitas dan dinamisnya demokratisasi suatu negara. Semakin tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan dibukanya ruang-ruang demokrasi. Memberikan suara dalam pemilihan umum menjadi salah satu indikator penting demokratis tidaknya sebuah negara. Dalam banyak studi masyarakat perbatasan dan pemilu, ada kecenderungan rendahnya angka partisipasi politik masyarakat. Berbagai faktor seperti ketidakpercayaan terhadap perubahan setelah pemilu, tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, hingga sikap apatis terhadap politik menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Padahal, partisipasi masyarakat yang tinggi dipercaya menunjukkan tingginya praktek demokrasi di suatu negara. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik masyarakat yang rendah menunjukkan kurang demokratisnya sistem politik suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat partisipasi masyarakat di Distrik Muara Tami, perbatasan RI-PNG khususnya kampung Mosso sebagai bagian dari evaluasi Pemilihan Umum 2019. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan menganalisa tingkat partisipasi masyarakat perbatasan, bentuk partisipasi politiknya serta faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas partisipasi. Selain itu penelitian ini juga akan memaparkan peran penyelenggara pemilu dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada Pemilu 2019 di Distrik Muara Tami, perbatasan RI-PNG

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Perbatasan

Abstract

Public participation in politics is an indicator of the stability and dynamism of a country's democratization. The higher the public participation shows the opening of democratic spaces. Giving votes in general elections is an important indicator of whether a country is democratic or not. In many studies of border communities and elections, there is a tendency for low levels of community political participation. Various factors such as distrust of changes after the election, low level of social welfare, to apathy towards politics are factors that influence the decision of the public to use their voting rights. In fact, high public participation is believed to indicate the high practice of democracy in a country. On the other hand, a low level of public political participation indicates a lack of democracy in a country's political system. This research aims to analyze the level of community participation in the Muara Tami District, the RI-PNG border, especially Mosso village as part of the evaluation of the 2019 General Election. Using a qualitative method, this study will analyze the level of participation of border communities, the form of political participation and the factors involved affect the intensity of participation. In addition, this research will also describe the role of election administrators in encouraging community involvement in the 2019 Election in Muara Tami District, the RI-PNG border.

Keywords: *Political Participation, Elections, Borders*

Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan bentuk penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dari rakyat di beberapa negara yang menggunakan sistem demokrasi. Hal ini sesuai dengan paham bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan dan juga orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Salah satu bentuk partisipasi politik yang juga menjadi standar demokrasi di berbagai negara adalah melalui pemilihan umum

(pemilu). Pemilu merupakan sarana politik dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 telah digariskan bahwa pemilu yang demokratis bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi yakni transparan dan akuntabel. Dengan landasaan legal ini, maka setiap warga negara dijamin haknya untuk menggunakan suaranya pada proses pemilu yang demokratis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka proses partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik. Akan tetapi sulit untuk membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (*autonomos participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan pihak lain (*mobilize participation*). Hal ini menjadi salah satu persoalan yang dihadapi dalam pemilu. Mobilisasi pemilih menjadi satu tantangan dari partisipasi masyarakat yang efektif. Permasalahan lainnya juga adalah adanya kelompok masyarakat yang tidak melibatkan dirinya dalam kegiatan politik (*apathy*). Mereka secara sadar tidak ingin memilih karena berbagai alasan. Mulai dari tidak tertarik pada isu maupun kandidat calon penguasa hingga kekecewaan terhadap sistem politik yang ada.

Permasalahan-permasalahan seperti ini menjadi lebih kompleks dalam masyarakat yang ada di perbatasan RI-PNG, tepatnya di Distrik Muara Tami. Di Distrik tersebut, seperti Kampung Mosso sebagian masyarakat masih sulit berbahasa Indonesia. Hubungan kekerabatan yang dekat antara orang asli Papua dengan PNG membuat adanya percampuran budaya dan bahasa. Selain kendala bahasa dan budaya, persoalan pendataan pemilih tetap (DPT) menjadi tantangan tersendiri. Tingginya mobilitas dari PNG ke Papua membuat banyaknya warga yang tidak terdaftar meski sudah menjadi warga negara Indonesia. Menurut KPU Provinsi Papua, persiapan pelaksanaan pemilu 2019 bagi masyarakat yang ada di Perbatasan RI-PNG menemui kendala tersendiri. Faktor-faktor yang muncul antara lain adanya kendala bahasa karena hubungan kekerabatan, data jumlah pemilih yang fluktuatif dan kepemilikan kartu identitas kependudukan. Disisi lain, adanya potensi mobilisasi pemilih dari PNG ke distrik Muara Tami juga tantangan tersendiri. Dalam beberapa data terkait kepemiluan dan masyarakat perbatasan, tingkat partisipasi masyarakat cukup rendah.

Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengkaji partisipasi dan faktor yang turut berkontribusi dalam mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019. Penelitian ini juga akan difokuskan pada bentuk partisipasi masyarakat sebelum dan ketika pemilu dilaksanakan, termasuk menganalisa peran penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Distrik Muara Tami khususnya Kampung Mosso, Perbatasan RI-PNG.

Tinjauan Pustaka

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme yang paling umum dari suatu negara yang demokratis untuk memilih wakil rakyat. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menyebutkan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, pemilu merupakan sarana legitimasi politik untuk merubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadis dan dapat membahayakan menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan nasional. Selain itu pemilu juga dikatakan sebagai wujud dari kedaulatan rakyat suatu negara.

Keikutsertaan rakyat dalam mengikuti pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Menurut Herbert McClosky partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (McClosky, 1972). Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal menetap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal efektif" (Huntington & Nelson, 1968). Norman H. Nie dan Sidney Verba mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka (Verba & Nie, 1972). Partisipasi dilakukan karena warga negara sebagai anggota masyarakat percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek atau memberikan dampak atau sering disebut sebagai *political efficacy*. Oleh karena itu dalam demokrasi ada anggapan semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat maka semakin baik, sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah dipandang tidak baik.

Jenis-jenis partisipasi politik berdasarkan intensitas dan frekuensi menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson yaitu (1) kegiatan yang tidak banyak menyita waktu, tidak menuntut prakarsa sendiri dan tidak mengikutinya secara intensif dan tidak sering melakukannya contohnya memberikan suara dalam pemilu; (2) kegiatan yang lebih intensif, menuntut prakarsa sendiri dan keterlibatan yang besar serta waktu yang banyak contohnya menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan atau anggota partai yang aktif. Selain itu kegiatannya dapat juga bersifat negatif misalnya pembunuh politik, teroris atau pelaku pembajakan untuk mencapai tujuan politik (Roth & Wilson, 1980).

Partisipasi politik menurut penerimaan dari masyarakat adalah apakah partisipasi itu bersifat sukarela, atas inisiatif (anggota) masyarakat, atukah partisipasi tersebut atas inisiatif (anggota) masyarakat atukah partisipasi tersebut diberi arah oleh pemerintah (pihak lain). Apabila partisipasi tersebut atas inisiatif masyarakat sendiri dan dilakukan secara sukarela maka disebut sebagai partisipasi otonom, sedangkan sebaliknya jika dikerahkan atau adanya unsur tekanan dari pemerintah (pihak atasan ataupun pihak yang berkuasa) maka disebut sebagai partisipasi dimobilisasi (Huntington & Nelson, 1968).

Milbrath mengemukakan ada empat faktor yang mendorong orang berpartisipasi politik yaitu adanya perangsang, faktor karakteristik pribadi seseorang, orang yang berwatak sosial dan mempunyai kepedulian besar terhadap masalah masyarakat biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. Ketiga, faktor karakter sosial seseorang yang menyangkut status sosial ekonomi yang akan ikut mempengaruhi persepsi, sikap

dan perilaku seseorang dalam politik. Keempat, faktor situasi dan lingkungan politik dimana lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik (Milbrath & M.L.Goel, 1977). Secara umum tipologi dari partisipasi sebagai kegiatan dibedakan sebagai partisipasi aktif, partisipasi pasif dan partisipasi golput (Ambardi, 2009). Sementara itu terdapat kategori partisipasi politik yang lain yakni apatis, spektator, gladiator dan pengkritik (Milbrath & M.L.Goel, 1977; Olsen, 1973; Paige, 1971). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh perilaku pemilih. Perilaku pemilih adalah realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal yakni hasil sosialisasi nilai dan lingkungannya dan faktor internal yang berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki (Surbakti, 1992).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam memperoleh gambaran yang mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat perbatasan di Distrik Muara Tami pada Pemilu 2019 khususnya di Kampung Mosso. Kekuatan penelitian ini terletak pada narasi kualitatifnya. Pemilihan metode naratif menjadi sangat tepat dalam memperdengarkan suara mereka yang termarginalkan. Hal ini sesuai dengan target penelitian yakni masyarakat perbatasan RI-PNG yang sering kali tidak mendapatkan perhatian cukup dalam pemilu. Melalui pendekatan naratif kualitatif, bentuk dan faktor pendorong partisipasi masyarakat akan dianalisa dengan menggali narasi-narasi mereka. Narasi, memori masa lalu, kekhawatiran masa kini dan harapan terhadap perubahan di masa depan menjadi sebuah cerita kehidupan (*life stories*) yang ditargetkan dari penelitian ini. Pembahasan terkait metode naratif, peneliti hanya menyediakan pertanyaan-pertanyaan utama untuk memandu proses narasi, tetapi pokok-pokok masalah diangkat oleh peserta sendiri. Harapan-harapan dan solusi yang mereka tawarkan pun adalah hasil pergumulan atas masalah dan situasi mereka.

Data primer akan didapatkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci maupun observasi partisipatif di lapangan. Untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat, maka wawancara mendalam akan diarahkan pada tokoh kunci pemuda, perempuan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh kunci relevan lainnya. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam dengan pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu di tingkatan provinsi maupun kota Jayapura. Sedangkan data sekunder, terkait DPT, DCT, data penduduk, tingkat kerawanan, dan data relevan lainnya akan diperoleh melalui dokumen-dokumen, laporan dan catatan yang disediakan penyelenggara pemilu, pemerintah daerah maupun melalui media.

Adapun cakupan dari penelitian ini akan berfokus pada bentuk partisipasi dan intensitasnya dalam proses sebelum dan ketika Pemilu dilaksanakan. Populasi dari penelitian ini adalah Distrik Muara Tami. Namun sampel akan difokuskan pada satu kampung yakni Mosso. Pemilihan kedua distrik ini dianggap representatif berdasarkan sebaran penduduk dan letak kedua kampung sebagai bagian terdepan di Perbatasan RI-PNG.

Data baik kualitatif dan kuantitatif yang terkumpul akan dianalisa melalui teknik *coding*. Hasil wawancara yang dituturkan oleh masyarakat akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu.

Profil Singkat Kampung Mosso Distrik Muara Tami

Kampung Mosso merupakan salah satu bagian dari kelurahan Muara Tami dengan distrik yang memiliki wilayah terluas di Kota Jayapura yang menempati 66,67 persen wilayah Provinsi Papua atau seluas 626,7 km². Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Jayapura menunjukkan bahwa distrik Muara Tami berjarak 40 km dari ibukota Jayapura. Kampung Mosso memiliki luas 32.7 km² dan memiliki jarak 65 km dari Kota Jayapura dan dari distrik Muara Tami memiliki jarak 13 km. Untuk jumlah kepadatan penduduk di distrik Muara Tami akan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Muara Tami Tahun 2015

No	Kampung/Kelurahan	Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Koya Barat	4.681	22
2	Koya Tengah	409	14
3	Koya Timur	3.662	38
4	Holtekam	1.086	82
5	Skouw Yambe	629	8
6	Skouw Mabo	636	5
7	Skouw Sae	620	12
8	Mosso	476	14
	Jumlah	12.381	20

Sumber: (BPS Kota Jayapura, 2015)

Tabel ini menunjukkan bahwa jumlah total penduduk di distrik Muara Tami adalah 12.381 jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk yang terbesar berada di Koya Barat dengan jumlah 4.861 orang dan terendah di Koya Tengah dengan jumlah 409. Kampung Mosso memiliki jumlah penduduk 476 setelah kampung Koya Tengah. Hal ini disebabkan karena kampung Mosso ini berbatasan langsung dengan negara PNG dan lokasinya juga masih dikelilingi oleh hutan – hutan belantara yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan hutan tersebut serimng diidentikkan dengan jalur tikus atau jalan alternatif menyusuri jalan ke PNG tanpa ada pengawasan dari pihak keamanan Indonesia. Untuk gambar wilayah kampung Mosso akan diuraikan pada gambar berikut ini.



Gambar. 1 Wilayah Kampung Mosso (Dokumentasi Pribadi)

Berdasarkan peraturan daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2006 tentang pembentukan Kampung Kayobatu, Kampung Waena dan Kampung Mosso. Peraturan dalam pasal 3 menunjukkan bahwa Kampung Mosso mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Wutung PNG, sebelah timur berbatasan dengan Negara PNG, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Yeti Kabupaten Keerom dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sae. Kampung ini merupakan kampung termuda di Distrik Muara Tami dan merupakan pemekaran dari Kampung Skouw Sae Hal ini menandakan bahwa posisi kampung ini merupakan kampung lintas batas dua negara di Papua. Situasi ini memiliki keunikan karena warga ini mempunyai kartu lintas batas yang berwarna merah (Indonesia) dan berwarna kuning (PNG) serta memiliki KTP WNI. Kartu tersebut hanya dimiliki oleh warga yang berdiam di wilayah tersebut dan bisa digunakan untuk melintas ke PNG. Sedangkan di luar dari warga dari Kampung Mosso yang terdapat di luar kabupaten lain atau suku-suku di luar Kampung Mosso harus menggunakan Passport dan Visa untuk ke PNG atau ke negara tetangga.

Kampung Mosso yang memiliki jarak 2 jam dari kota jayapura memiliki keistimewaan dibandingkan dari kampung lainnya. Berdasarkan penuturan kepala kampung Mosso, Agus Wepafoa mengatakan bahwa:

“...Warga kampung Mosso sering ke PNG dan ini menjadi sesuatu yang normal karena penduduknya memiliki tanah adat di PNG dan tanah adat ini terbentuk sebelum batas-batas negara Indonesia dan PNG ada dimana tanah tersebut didapatkan dari nenek moyang sukunya yaitu suku Nyao melalui perang suku dan masih banyak suku tersebut mendiami kampung tersebut”.

Kampung Mosso ini bukan hanya entitas administratif belaka melainkan juga entitas adat dimana kepala adat dikenal dengan ondoafi. Pada era 1960-an dimana Papua belum terintegrasi dengan Indonesia, warga Kampung Mosso mejadi pengungsi ke PNG untuk menghindari potensi-potensi bahaya akibat dari konflik yang terjadi di Papua. Warga tersebut mengungsi menelusuri hutan dan bertempat tinggal di perbatasan sehingga kampung pernah terabaikan dan tidak berpenghuni beberapa

dekade. Oleh sebab itu warga di kampung ini memiliki bahasa Fijian English atau bahasa PNG dan bahasa Indonesia atau melayu Papua. Kebanyakan warga di kampung ini bermatapencaharian bertani atau bercocok tanam sebagai petani, peternak, pedagang kecil – kecilan (kios) berburu dan hanya sedikit yang berprofesi PNS dan penduduknya masih bergantung pada hasil alam.

Pemilihan Umum di Kampung Mosso Distrik Muara Tami Kota Jayapura

Pada tanggal 17 april 2019 merupakan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden serta legislatif di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pemilihan ini merupakan pesta demokrasi bagi Indonesia untuk melakukan pemilihan setiap lima tahun sekali, dan tahun ini menjadi sejarah pertama untuk melaksanakan pemilihan yang serentak bersamaan dengan caleg. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan ini menggunakan hak suaranya dengan mencoblos 5 kertas surat suara yaitu pertama, warna kuning surat suara pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPR. Kedua, warna merah surat suara pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) terdiri atas Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPD. Ketiga, warna biru surat suara pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Keempat, warna hijau surat suara pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kelima, surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diberi warna abu-abu. Surat suara warna ini terdiri atas surat suara Pasangan Calon (Paslon) untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan serentak ini juga terjadi di provinsi Papua, ujung timur Indonesia. Penelitian ini akan dikhususkan pada Kampung Mosso, Distrik Muara Tami kota Jayapura. Berikut akan dilampirkan Tabel Data Pemilih Tetap di Distrik Muara Tami

Tabel 2. Data Pemilih Tetap di Di Distrik Muara Tami

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih	Laki-laki	Perempuan
1.	Holtekamp	3	643	326	317
2.	Koya Barat	19	5320	2892	2428
3.	Koya Tengah	2	405	238	167
4.	Koya Timur	12	3151	1650	1501
5.	Mosso	2	372	213	159
6.	Skouw Mabo	2	331	174	157
7.	Skouw Sae	2	360	184	176
8.	Skouw Yambe	2	400	191	209
	Total	44	10.982	5868	5114

Sumber: (KPU Kota Jayapura, 2019)

Tabel ini menunjukkan bahwa data jumlah pemilih di delapan kelurahan dengan jumlah TPS yang mencapai 44. Jumlah data pemilih yang terbanyak ada di kelurahan Koya Barat dengan jumlah 5320 orang. Sedangkan yang terkecil ada di kelurahan Skouw Mabo dengan jumlah 331 orang. Untuk kelurahan di Mosso terdapat jumlah

data TPS sebanyak 2 dengan jumlah pemilih 372 dengan jumlah laki-laki 213 dan perempuan 159.

Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Mosso Tahun 2019

Pemilihan umum merupakan salah satu pesta demokrasi yang dilaksanakan di Kampung Mosso dan menjadi satu – satunya kampung yang memiliki jumlah penduduk yang terendah di Distrik Muara Tami. Penduduk kampung Mosso ini merupakan penduduk asli yang pada awalnya telah lama tinggal di wilayah negara PNG dan kemudian menetap di PNG. Oleh karena itu mobilisasi penduduk Kampung Mosso cukup tinggi untuk bermigrasi ke wilayah PNG untuk mengunjungi sanak saudara dan juga untuk mendapatkan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan serta penduduk yang berasal dari luar kampung Mosso yang tinggal di kampung tersebut karena ikatan perkawinan dengan wilayah yang ada di Kampung Mosso. Partisipasi Pemilihan Umum di Kampung Mosso akan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Partisipasi Pemilihan Umum di Kampung Mosso Tahun 2019

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara TPS 001	Jumlah Perolehan Suara TPS 002
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13	26
2	Partai Gerindra	13	2
3	PDI Perjuangan	13	31
4	Partai Golkar	11	12
5	Partai Nasdem	10	9
6	Partai Garuda	1	4
7	Partai Berkarya	7	26
8	Partai Keadilan Sejahtera	9	1
9	Partai Perindo	3	1
10	Partai Persatuan Pembangunan	21	4
11	Partai Solidaritas Indonesia	4	1
12	Partai Amanat Nasional	1	1
13	Partai Hanura	0	4
14	Partai Demokrat	15	8
15	Partai Bulan Bintang	1	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	2
	Total	122	131

Sumber: (KPU Kota Jayapura,2019)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi jumlah pemilihan umum yang berlangsung di Kampus Mosso berjumlah 253 orang dengan jumlah perolehan suara di TPS 001 berjumlah 122 dan TPS 002 berjumlah 131. Adapun jumlah partai untuk pemilihan legislatif berjumlah 16 partai dengan jumlah perolehan partai yang terbanyak adalah partai PDI Perjuangan dengan perolehan suara 44 orang. Adapun TPS 001 berlokasi di Kampung Mosso dan TPS 002 berlokasi di pasar Skouw atau perbatasan RI – PNG.

Jika dibandingkan dengan jumlah dengan data pemilih di Kampung Mosso 372 surat suara, sedangkan jumlah yang berpartisipasi adalah 253 orang dan hal ini dapat dikategorikan bahwa semua surat suara tidak digunakan oleh pemilih yang berdomisili di Kampung Mosso, dimana 119 orang dikategorikan tidak menggunakan hak suaranya. Adapun alasan yang dapat dikemukakan selain karena masalah teknis seperti surat suara karena rusak, tidak digunakan atau pencoblosan yang salah. Selain itu faktor faktor yang menyebabkan karena kendala bahasa terkait untuk pencoblosan, data jumlah penduduk yang berubah-ubah serta kepemilikan KTP atau kartu identitas kependudukan yang bermasalah. Berdasarkan wawancara dengan Pengawas Distrik mengemukakan bahwa kendala utama partisipasi masyarakat di Kampung Mosso rendah, hal ini disebabkan karena bahasa yang sulit, penduduk setempat kebanyakan tidak memahami bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Fidjin English, alat komunikasi atau signal yang tidak ada, hal ini mempengaruhi masyarakat untuk mengetahui atau memahami terkait pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Selain itu dalam masalah administratif dimana tidak memiliki surat suara dan tidak memiliki KTP.

Pihak- pihak atau *stakeholders* dalam pemilihan umum sendiri sudah berupaya untuk mendatangi masyarakat dari pintu ke pintu (*door to door*) terkait sosialisasi pemilu, hanya saja masyarakat setempat terkadang tidak tinggal di rumah atau berpergian ke negara PNG. Tujuannya bisa karena pesta adat maupun karena urusan-urusan lainnya sehingga penyelenggara kesulitan untuk bertemu. Namun, hanya beberapa warga tersebut yang bisa dilakukan sosialisasi terkait dengan pemilihan umum. Selain itu juga masalah-masalah kurangnya bimtek (bimbingan teknis) terhadap para pengawas pemilih kampung maupun distrik mengakibatkan keterlibatan masyarakat di perbatasan jadi menurun. Berdasarkan penuturan dari pihak keamanan yang berlokasi di perbatasan menjelaskan bahwa proses kegiatan pemilihan umum di Kampung Mosso dapat dikatakan berjalan dengan baik dan pengawasan yang dilakukan di tempat tertentu berjalan dengan baik.

Penutup

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilihan umum di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Perbatasan RI – PNG dapat dikategorikan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena eksistensi kampung yang berbatasan dengan Papua New Guinea sehingga kendala- kendala administratif lainnya menjadi salah satu alasan utama dalam pemilu. Selain itu sosialisasi maupun masalah teknologi komunikasi yang sangat sulit mengakibatkan pihak pemangku kepentingan sulit untuk menginformasikan terkait pemilu. Masalah bahasa sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan petugas pemilu setempat menjadi pemicu untuk keterlibatan masyarakat. Pada umumnya warga di Kampung Mosso menggunakan bahasa fidjin English atau bahasa lokal setempat. Selain itu juga faktor dari penyelenggara pemilu yang kurang dalam mensosialisasikan pentingnya akan partisipasi masyarakat dalam pemilu serta kurangnya bimbingan teknis yang dilakukan dalam level distrik maupun kampung mengakibatkan masyarakat menjadi apatis akan pemilu.

Oleh sebab itu ada beberapa saran yang bisa ditawarkan penelitian ini yakni (1) Adanya kesadaran politik bagi masyarakat Kampung Mosso untuk menjunjung tinggi Demokrasi dan melibatkan diri utk mensukseskan pesta Demokrasi; (2) Adanya kolaborasi yang terjadi antara *stakeholders* kepemiluan dengan kepala kampung untuk mensukseskan pemilu; (3) Adanya bimtek yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik di level provinsi maupun lokal terhadap petugas di level kampung.

Daftar Pustaka

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- McClosky, H. (1972). *Political Participation*. The Macmillan Company.
- Milbrath, L., & M.L.Goel. (1977). *Political Participation*. Rand McNally College Publishing Co.
- Olsen, M. E. (1973). A Model of Political Participation Stratification. *Journal of Political and Military Sociology*, 1.
- Paige, J. M. (1971). Political Orientation and Riot Participation. *American Sociological Review*.
- Roth, D., & Wilson, F. L. (1980). *The Comparative Study of Politics*. Englewood Cliffs.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America*. Harper and Row.